

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD
KAB. TABALONG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan karunia Nya yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan lahir dan bathin sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dapat diselesaikan meskipun banyak kekurangan - kekurangan di dalamnya.

Perubahan Rencana Kerja ini di susun sebagai salah satu kelengkapan yang harus dipenuhi dalam rangka perwujudan system perencanaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan di Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong guna meningkatkan kinerja organisasi dan sebagai pedoman di dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP/LKJiP) di buat berdasarkan Tupoksi yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong.

Guna memperlancar Pembangunan dan Pelayanan Publik maka perlu meningkatkan pelayanan Administrasi secara optimal dan profesional kepada Legislatif, meningkatkan kualitas aparatur, memupuk kerjasama antar instansi terkait, sehingga dapat terwujud tertib administrasi, secara efektif dan efisien serta penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN sebagai dambaan masyarakat.

Akhirnya ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini, khususnya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tabalong sehingga Perubahan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong ini dapat di selesaikan dengan baik, Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan perlindungan NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas sesuai tugas dan fungsi masing masing. Aamiin

Terima Kasih

Tanjung, Agustus 2025

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TABALONG**

Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670720 199103 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	HAL i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD s.d. Triwulan II Tahun 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD s.d. Triwulan II Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	7
2.2 Analisis Kinerja pelayanan SETWAN	9
2.3 Isu isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	9
2.4 Reviuw Terhadap Rancangan awal RKPD	13
BAB III . RENCANA KERJA DAN PEDANAAN SETWAN DAERAH	18
BAB IV PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di amanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (5) perumusan rancangan akhir; dan (6) penetapan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan dengan melihat hasil kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja serta mempertimbangkan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong

Berdasarkan uraian di atas. dapat disimpulkan bahwa keterkaitan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

Perubahan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan daerah Tk, II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

- 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana

- Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
 19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 29).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1 MAKSUD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3.2 TUJUAN

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SETWAN sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SETWAN

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SETWAN

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun selain berpedoman dengan Perubahan RKPD, juga berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Dalam hal ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

2.1.1 Evaluasi Kesesuaian Renja Tahun 2025 Terhadap APBD Tahun 2025

2.1.1.1 Kesesuaian Program Antara Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada rencana kerja Sekretariat DPRD dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah program dalam renja sama dengan jumlah program yang ada dalam APBD, yaitu ada 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

2.1.1.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan yang ada pada rencana kerja Sekretariat DPRD dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 100%. Artinya bahwa jumlah kegiatan dalam renja sama dengan jumlah kegiatan yang ada dalam APBD, yaitu ada 16 kegiatan.

2.1.1.3 Kesesuaian Sub Kegiatan Antara Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi terhadap sub kegiatan yang ada pada rencana kerja Sekretariat DPRD dengan APBD Tahun 2025, terdapat kesesuaian 97,62 %. Hal ini terjadinya sehubungan dengan hasil asistensi, dimana kegiatan bimtek DPRD yang semula dianggarkan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dipindahkan ke

sub kegiatan baru yaitu Bimbingan Teknis DPRD.

2.1.1.4 Kesesuaian Pagu Anggaran Antara Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025

Anggaran Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 sebesar Rp. 55.091.634.237, sedangkan anggaran Sekretariat DPRD berdasar APBD 2025 adalah sebesar Rp. 51.943.992.696. Terdapat selisih kurang anggaran antara Renja dengan APBD 2025 sebesar Rp. 3.147.641.541,- seiring dengan proses penganggaran yang berjalan.

Hasil evaluasi kesesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran antara renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. dibawah ini.

Tabel 2.1.
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 dengan APBD 2025

No	Uraian	Renja 2025	APBD 2025
1	Program	2	2
2	Kegiatan	16	16
3	Sub Kegiatan	41	42
4	Pagu Anggaran	Rp. 55.091.634.237,-	Rp. 51.943.992.696,-

Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2. Perbandingan Anggaran, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada Renja dan APBD Sekretariat DPRD Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2025			APBD 2025		
			Target capaian kinerja		Pagu Indikatif (RP)	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif (RP)
			Volume	Satuan		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	BB	Indeks	32.262.686.963	BB	Indeks	31.247.366.912
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	124.019.329	100	%	72.568.315
	1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Dokumen	124.019.329	30	Dokumen	72.568.315
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14	Bulan	3.882.059.000	14	Bulan	4.031.802.000
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	3.882.059.000	14	Bulan	4.031.802.000
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	2.912.429.860	100	%	1.740.713.641
	3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	518	item	14.575.000	518	item	14.575.000
	3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10050	item	245.906.199	10050	item	245.906.199
	3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Tahun	982.610.120	12	bulan	959.977.314
	3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	83535	item	79.313.538	83535	item	64.706.377
	3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185	OK	1.590.025.003	185	OK	455.548.751
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	62	buah	1.078.543.556	62	buah	1.106.401.728
	4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	buah	604.543.500	105	buah	667.310.768
	4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	Bangunan	474.000.056	2	Bangunan	439.090.960

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2025			APBD 2025		
				Target capaian kinerja		Pagu Indikatif (RP)	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif (RP)
				Volume	Satuan		Volume	Satuan	
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa urusan Set DPRD & DPRD	100	%	2.179.797.880	100	%	2.179.040.008
	5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	Tahun	358.800.000	12	bulan	316.800.000
	5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa umum dan tenaga kontrak	1	Tahun	1.820.997.880	12	bulan	1.862.240.008
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik Set DPRD	100	%	1.307.417.414	100	%	1.188.038.304
	6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat/perlengkapan Kantor yang dibeli	463	item	699.436.944	463	item	795.129.483
	6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	11	item	89.223.706	110	Buah	91.054.956
	6.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bahan pemeliharaan gedung kantor ang dibeli	100	%	518.756.764	100	%	301.853.865
7		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	%	20.092.456.024	100	%	20.128.162.024
	7.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah bulan Gaji tunjangan yang dibayar	12	Bulan	19.735.692.000	12	Bulan	19.785.692.000
	7.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian yang dibeli	159	Buah	323.764.024	159	Buah	309.470.024
	7.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah anggota DPRD	30	Orang	33.000.000	30	Orang	33.000.000
8		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD	100	%	685.963.900	100	%	800.640.892
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya rapat-rapat DPRD	17	kali	335.963.900	17	kali	272.640.900
	8.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Bulan kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	12	Bulan	350.000.000	12	Bulan	527.999.992
B		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	- Persentase perda yg diselesaikan tepat waktu - Persentase layanan anggaran	100	%	22.828.947.274	100	%	20.696.625.784

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2025			APBD 2025		
			Target capaian kinerja		Pagu Indikatif (RP)	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif (RP)
			Volume	Satuan		Volume	Satuan	
9		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	13	Raperda	2.992.897.474	13	Raperda	540.463.984
	9.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8	Raperda	974.744.654	8	Perda	355.930.804
	9.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8	Raperda	69.996.820	100	%	69.996.820
	9.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	8	Raperda	1.948.156.000	100	%	114.536.360
10		Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	700.000.000	100	%	205.008.000
	10.1	Pembahasan KUA dan PPAS	1	Perda	32.200.000	1	Nota kesepakatan	30.929.000
	10.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Perda	17.920.000	1	Perda	17.920.000
	10.3	Pembahasan APBD	1	Perda	47.920.000	1	Perda	47.920.000
	10.4	Pembahasan APBD Perubahan	1	Perda	47.920.000	1	Perda	47.920.000
	10.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	Perda	554.040.000	1	Berita Acara	60.319.000
11		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%	859.492.875	100	%	811.980.875
	11.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	3	Kegiatan	138.250.000	100	%	134.250.000
	11.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	3	Kegiatan	112.250.000	40	Kegiatan	112.250.000
	11.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	3	Kegiatan	112.500.000	40	Kegiatan	112.500.000
	11.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	3	Kegiatan	112.500.000	40	Kegiatan	112.500.000
	11.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	3	Kegiatan	112.250.000	40	Kegiatan	112.250.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja 2025			APBD 2025		
				Target capaian kinerja		Pagu Indikatif	Target capaian kinerja		Pagu Indikatif
				Volume	Satuan		(RP)	Volume	
	11.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	3	Kegiatan	48.842.875	100	%	38.630.875
	11.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pelayanan pengawasan	3	Kegiatan	222.900.000	40	Kegiatan	189.600.000
12		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	160	Pemberita an	525.818.195	160	Pemberita an	1.326.277.195
	12.1	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah orang kali kegiatan				90	orang/keg	800.459.000
	12.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersebarluaskannya pelaksanaan tugas DPRD	160	Pemberita an	525.818.195	160	Pemberita an	525.818.195
13		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	2.932.060.000	100	%	2.781.173.500
	13.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunker yang dilaksanakan	270	kunker	132.060.000	360	kali	182.060.000
	13.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokir DPRD yang disusun	1	dokumen	150.000.000	4	dokumen	63.991.000
	13.3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya pelaksanaan reses DPRD	3	kali	2.650.000.000	3	kali	2.535.122.500
14		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	100	%	240.786.225	100	%	46.912.225
	14.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelanggaran kode etik	1	Kegiatan	240.786.225	0	%	46.912.225
15		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	100	%	74.076.505	100	%	11.384.005
	15.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	160	Bahan	74.076.505	122	Bahan	11.384.005
16		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100	%	14.503.816.000	100	%	14.973.426.000
	16.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya rapat-rapat luar daerah perjalanan dinas keluar daerah	27	kali	14.503.816.000	250	kali	14.973.426.000
Total						55.091.634.237			51.943.992.696

Berdasarkan data perbandingan antara Renja 2025 dan APBD 2025 pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar kegiatan dan sub kegiatan pada APBD disusun masih mengacu pada Renja, hal ini dapat dilihat dari persentase kesesuaian Program sebesar 100 persen, persentase kesesuaian kegiatan sebesar 100 persen dan persentase kesesuaian sub kegiatan sebesar 97,62 persen. Namun yang menjadi catatan, indikator dan target pada APBD pada sebagian kegiatan dan sub kegiatan masih belum sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan di Renja 2025. Hal ini disebabkan oleh tidak diinputnya / tidak diperbaruinya indikator dan target Renja 2025 ke dalam sistem SIPD sehingga hasil cetak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagian besar masih menampilkan target indikator lama.

2.1.2 Ketercapaian Kinerja Sampai Triwulan II Tahun 2025

Sebagaimana disebutkan di bagian sebelumnya, penilaian hasil pelaksanaan Renja menggunakan data realisasi pelaksanaan APBD sebagai acuan. Berikut rekapitulasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai triwulan II tahun 2025.

Tabel 2.3 Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Sampai Triwulan II Tahun 2025

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Catatan
				Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan	Kinerja	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
A		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Nilai AKIP	31.247.366.912	BB	13.012.070.785	41,64	-	
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.568.315	100	21.366.800	29,44	56,67	
	1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	72.568.315	30	21.366.800	29,44	17	
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Gaji tunjangan yang dibayar	4.031.802.000	14	1.477.815.729	36,65	7	
	2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Gaji tunjangan yang dibayar	4.031.802.000	14	1.477.815.729	36,65	7	
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	1.740.713.641	100	480.967.371	27,63	29,00	
	3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/penerangan kantor yang dibeli	14.575.000	518	5.743.550	39,41	270	
	3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	245.906.199	10050	109.439.150	44,50	705	
	3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Logistik Kantor	959.977.314	12	230.976.000	24,06	6	
	3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang dibeli	64.706.377	83535	10.554.100	16,31	2846	
	3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Orang kali kegiatan	455.548.751	185	124.254.571	27,28	60	
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	1.106.401.728	62	129.232.250	11,68	19,52	
	4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	667.310.768	105	129.232.250	19,37	41	
	4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	439.090.960	2	0	0,00	0	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Catatan
				Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan	Kinerja	
B		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	- Persentase perda yg diselesaikan tepat waktu - Persentase layanan anggaran	20.696.625.784	100,00	5.682.807.181	27,46	25,00	
9		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbahasnya rancangan perda	540.463.984	13	61.662.150	11,41	2,00	
	9.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terbentuknya perda yang difasilitasi	355.930.804	8	46.569.150	13,08	2	
	9.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terbahasnya rancangan perda	69.996.820	100	4.695.000	6,71	7	
	9.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	114.536.360	100	10.398.000	9,08	9	
10		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya pembahasan kebijakan anggaran	205.008.000	100	1.271.500	0,62	0,00	
	10.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Disepakatinya KUA-PPAS	30.929.000	1	1.271.500	4,11	0	
	10.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya penyusunan APBD	17.920.000	1	0	0,00	0	
	10.3	Pembahasan APBD	Terlaksananya penyusunan APBD	47.920.000	1	0	0,00	0	
	10.4	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya penyusunan APBD	47.920.000	1	0	0,00	0	
	10.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah berita acara pertanggungjawaban APBD	60.319.000	1	0	0,00	0	
11		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	811.980.875	100	88.350.000	10,88	13,14	
	11.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pelayanan pengawasan bidang Pemerintahan dan Hukum	134.250.000	100	28.240.000	21,04	9	
	11.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Terlaksananya pelayanan pengawasan	112.250.000	40	11.550.000	10,29	6	
	11.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pelayanan pengawasan	112.500.000	40	18.810.000	16,72	9	
	11.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Terlaksananya pelayanan pengawasan	112.500.000	40	5.115.000	4,55	3	

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025		Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Catatan
				Keuangan	Kinerja	Keuangan	Keuangan	Kinerja	
	11.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya pelayanan pengawasan	112.250.000	40	10.835.000	9,65	6	
	11.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK	38.630.875	100	0	0,00	0	
	11.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya pelayanan pengawasan	189.600.000	40	13.800.000	7,28	4	
12		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	1.326.277.195	160	690.527.035	52,07	49,20	
	12.1	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah orang kali kegiatan	800.459.000	90	531.857.717	66,44	61	
	12.2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersebarluaskannya pelaksanaan tugas DPRD	525.818.195	160	158.669.318	30,18	49	
13		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.781.173.500	100	852.341.000	30,65	33,33	
	13.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunker yang dilaksanakan	182.060.000	360	19.860.000	10,91	120	
	13.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Pokir DPRD yang disusun	63.991.000	4	5.007.000	7,82	1	
	13.3	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya pelaksanaan reses DPRD	2.535.122.500	3	827.474.000	32,64	1	
14		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	46.912.225	100	0	0,00	0,00	
	14.1	Pengawasan Kode Etik DPRD	Pelanggaran kode etik	46.912.225	0	0	0,00	0	
15		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	11.384.005	100	741.000	6,51	0,00	
	15.1	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	11.384.005	122	741.000	6,51	80	
16		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.973.426.000	100	3.987.914.496	26,63	60,40	
	16.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terselenggaranya rapat-rapat luar daerah perjalanan dinas keluar daerah	14.973.426.000	250	3.987.914.496	26,63	151	
Total				51.943.992.696		18.694.877.966	35,99		

Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD sampai triwulan II diatas diolah berdasarkan data pada formulir evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah sesuai format evaluasi renja dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Renja dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja serta implikasi yang timbul, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk tindakan perencanaan selanjutnya.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 tersebut, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 3.004.144.913,- atau sekitar 36,89 persen dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan III dan IV serta juga menyesuaikan dengan kegiatan DPRD sesuai BANMUS DPRD, diantaranya yaitu :

1. Perlengkapan dan Rumah Tangga Bagian Umum, Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
2. Fasilitasi Anggaran Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan, Sub Kegiatan
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan APBD Perubahan
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
3. Fasilitasi Pengawasan Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan, Sub Kegiatan :
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4. Humas dan Protokol Bagian Persidangan, Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2016), Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong sebagai unsur pelayanan (Administrasi) terhadap DPRD Kabupaten Tabalong. Sesuai dengan Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong yaitu :

- 1. Memberikan pelayanan Adminsitasi pada Anggota DPRD Kabupaten Tabalong.
- 2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang sidang.
- 3. Melaksanakan urusan Rumah tangga dan keuangan.
- 4. Melaksanakan Pengelolaan Tata usaha DPRD Kabupaten.

maka untuk mengetahui Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 untuk optimalisasi fungsi pelayanan adalah :

- 1. Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran.
- 2. Persentase Perda yang terseleaika tepat waktu.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan SETWAN Kabupaten Tabalong sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja (Triwulan II)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-	Kondisi Akhir
			2024	2025	2026	
1	Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran	%	100	25	100	100
2	Persentase Perda yang terselesaikan Tepat Waktu	%	100	25	100	100

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026

Program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak mencapai/memenuhi target yang direncanakan akan mempunyai implikasi terhadap target capaian program Renstra SETWAN Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026. Dengan adanya Program/kegiatan yang realisasi kinerja hasil/keluarannya tidak mencapai/memenuhi target yang direncanakan maka capaian sasaran program dan sasaran strategis dalam Renstra SETWAN Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 juga tidak akan mencapai/memenuhi target yang direncanakan. Kondisi ini menuntut kerja keras semua aparatur di SETWAN Kabupaten Tabalong supaya pada perubahan APBD tahun 2025, semua Program/kegiatannya mencapai/memenuhi dan melebihi target yang direncanakan.

2. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas dan Efisiensi alokasi belanja;
- b. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target;
- c. Penyesuaian target kinerja keluaran/hasil; dan
- d. Merumuskan kembali kegiatan-kegiatan.

Adapun rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berjalan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.

Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021 SETWAN Kabupaten
Tabalong

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) dan Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah)Tahun 2023
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Triwulan II)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Triwulan II)	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
4.02 . 4.02.0 1 . 01	Program Penunjang Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran	100,%	100,%	100,%	25%	25%	100 %
		Persentase Perda yang terselesaikan tepat waktu	100,%	100,%	100,%	25%	25,%	100,%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABALONG

Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif pada Anggota DPRD. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong melakukan berorientasi pada upaya peningkatan Komprehensif dengan menekankan pada skala prioritas dan bermanfaat bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara umum, di samping itu akan semakin meningkatkan pola hubungan yang harmonis, yang seimbang dan setara antara lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif melalui mekanisme mekanisme.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi kedepan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Setwan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Setwan ,yaitu :

1. Sumber Daya Manusia

- Masih adanya pegawai yang kurang disiplin sehingga berpengaruh terhadap kinerja SETWAN;
- Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya ; dan
- Belum tersusunnya standart kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD.

2. Anggaran

- Terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan program Kegiatan.

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung .

- Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap Anggota dan Pimpinan DPRD diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- Belum optimalnya pelaksanaan SPIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong

5. Koordinasi

- Kurang optimalnya koordinasi masing-masing bagian dalam

- menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat; dan
- Belum optimalnya koordinasi antara legislative dengan perangkat daerah, seringkali rapat rapat yang tidak dihadiri oleh perangkat daerah.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program/kegiatan yang indikator kinerja keluaran/hasilnya tidak mencapai/memenuhi target yang direncanakan akan berpengaruh terhadap capaian indikator strategis sasaran SETWAN Kabupaten Tabalong. Selanjutnya akan berdampak terhadap capaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024. Masih adanya program/kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga berdampak juga terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan SETWAN Kabupaten Tabalong dalam meningkatkan kinerja sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Berkembang pesatnya teknologi informasi perencanaan yang berbasis *website*;
2. Adanya tawaran bimtek-bimtek, maupun bimtek yang diadakan oleh kantor sendiri.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja SETWAN Kabupaten Tabalong di masa yang akan datang maka isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas SETWAN Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6.
ISU-ISU STRATEGIS

No.	Aspek	Isu Strategis
(1)	(2)	(3)
1	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD .
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan penjangkaran aspirasi dalam proses perencanaan
2	Sumber daya manusia	Peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya
		Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab ASN
		Penyusunan standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan SETWAN
3	Sistem perencanaan/ sistem pengelolaan data	Peningkatan pengelolaan sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga sumber data masih beragam
4.	Anggaran	Efisiensi penggunaan anggaran
5.	Sarana dan Prasarana	Optimalisasi pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan Renja SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tabalong.

Proses penelaahan dan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan dengan tujuan agar program/kegiatan yang disusun oleh SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tabalong selaras dengan rencana program/kegiatan dan prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun

2025. Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Temuan dan catatan penting dari proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program-program pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong terdiri dari 2 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan sebagai berikut :

- A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.3 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 8 Layanan Administrasi DPRD
 - 8.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - 8.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

- B PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**
- 9 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 9.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 9.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - 9.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
 - 10 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 10.1 Pembahasan KUA dan PPAS
 - 10.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 10.3 Pembahasan APBD
 - 10.4 Pembahasan APBD Perubahan
 - 10.5 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - 11 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 11.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 11.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
 - 11.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 11.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
 - 11.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Sumber Daya Alam
 - 11.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - 11.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - 12 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 12.1 Bimbingan Teknis DPRD
 - 12.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 13 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 13.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - 13.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 13.3 Pelaksanaan Reses
 - 14 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 14.1 Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 15 Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - 15.1 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 - 16 Fasilitasi Tugas DPRD
 - 16.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SEKRETARIAT DPRD					88.669.624.33 9,00	108.779.481.03 9,00	101.204.483.53 5,00						93.756.259.19 3,00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					88.669.624.33 9,00	108.779.481.03 9,00	101.204.483.53 5,00						93.756.259.19 3,00	
SEKRETARIAT DPRD					88.669.624.33 9,00	108.779.481.03 9,00	101.204.483.53 5,00						93.756.259.19 3,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Cakupan layanan administrasi umum Sekretariat DPRD		100 %	100 %	46.445.577.50 5,00	51.957.574.434, 00	56.733.365.563, 00						41.763.016.31 7,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 %	100 %	240.907.400,0 0	144.259.600,00	144.259.600,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		510.725.600,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	100.971.800,0 0	75.179.800,00	110.643.800,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		55.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Laporan	6 Laporan	94.871.800,00	69.079.800,00	21.047.800,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		305.725.600,0 0	SEKRETAR IAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		4 Dokumen	4 Dokumen	45.063.800,00	0,00	0,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		150.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	6.047.146.140,00	7.004.599.040,00	7.004.599.040,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		5.928.151.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	5.678.151.000,00	6.844.841.000,00	6.934.841.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		5.678.151.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pelaksanaan Penatausahaan dan														
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		16 Dokumen	16 Dokumen	289.965.900,00	106.520.800,00	88.508.800,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		165.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	79.029.240,00	53.237.240,00	22.213.240,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		85.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100 %	100 %	588.708.108,0 0	704.772.108,00	704.772.108,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		660.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4 Dokumen	4 Dokumen	34.474.280,00	34.474.280,00	18.362.280,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		55.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4 Dokumen	4 Dokumen	8.584.828,00	8.584.828,00	8.584.828,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		55.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40 Orang	38 Orang	545.649.000,0 0	661.713.000,00	347.442.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		550.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %	3.045.936.948, 00	3.334.523.677,0 0	3.334.523.677,0 0			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		2.411.461.954, 00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Komponen Instalasi														
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	100.717.556,0 0	100.717.556,00	100.717.556,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		25.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	12 Paket	344.798.035,0 0	644.734.764,00	528.548.975,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		327.548.325,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	902.606.016,0 0	882.156.016,00	857.540.016,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		1.081.657.000, 00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	175.741.941,0 0	175.741.941,00	153.053.888,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		85.346.629,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	90 Laporan	1.522.073.400, 00	1.531.173.400,0 0	722.038.400,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		891.910.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD

[illegible]

[illegible]

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakira an Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		49 Unit	49 Unit	5.321.376.694,00	5.266.624.694,00	4.981.624.694,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		2.945.555.594,00	SEKRETAR IAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD		100 %	100 %	20.636.485.068,00	25.436.485.068,00	25.436.485.068,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		21.513.985.068,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	20.160.985.068,00	24.960.985.068,00	24.963.985.068,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		20.160.985.068,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	442.500.000,00	442.500.000,00	1.803.400.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		1.320.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		30 Orang	30 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		33.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Layanan Administrasi DPRD	Persentase terpenuhinya layanan administrasi DPRD		100 %	100 %	864.514.832,00	864.514.832,00	864.514.832,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		853.934.836,00	SEKRETAR IAT DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		25 Laporan	25 Laporan	352.440.000,00	352.440.000,00	352.440.000,00	Kab. Tabalong , Murung Puduk, Mabu'un	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		342.395.200,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	512.074.832,00	512.074.832,00	2.004.019.623,00	Kab. Tabalong , Murung Puduk, Mabu'un	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		511.539.636,00	SEKRETAR IAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Persidangan/Risalah , Legislasi dan Humas Protokol		100 %	100 %	42.224.046.834,00	56.821.906.605,00	44.471.117.972,00						51.993.242.876,00	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi		100 %	100 %	4.160.076.760,00	17.443.140.760,00	17.443.140.760,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		13.408.541.400,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyusunan dan Pembahasan Program														
Pembentukan Peraturan Daerah														

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	406.881.746,0 0	406.881.746,00	360.487.746,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		375.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	101.525.687,0 0	101.525.687,00	101.525.687,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		69.996.820,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan		8 Dokumen	8 Dokumen	3.265.079.940, 00	16.548.143.940, 00	900.729.040,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		12.513.544.58 0,00	SEKRETAR IAT DPRD
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan														
Naskah Akademik														
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		3 Dokumen	3 Dokumen	313.794.469,0 0	313.794.469,00	276.554.469,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		300.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyusunan Tata Tertib DPRD														
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	72.794.918,00	72.794.918,00	53.960.918,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		150.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi		100 %	100 %	706.038.100,0 0	2.206.038.100,0 0	2.206.038.100,0 0			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		755.860.458,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Pembahasan KUA dan PPAS														
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen	44.893.420,00	44.893.420,00	44.893.420,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		36.641.100,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		1 Dokumen	1 Dokumen	44.893.420,00	44.893.420,00	44.893.420,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		26.640.757,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pembahasan APBD														
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		1 Dokumen	1 Dokumen	58.039.420,00	58.039.420,00	58.039.420,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		71.737.596,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pembahasan APBD Perubahan														
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		1 Dokumen	1 Dokumen	54.043.420,00	54.043.420,00	54.043.420,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		70.251.085,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														

[illegible]

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		25 Laporan	25 Laporan	85.000.000,00	85.000.000,00	46.970.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		85.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		25 Laporan	25 Laporan	84.750.000,00	84.750.000,00	46.970.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		84.750.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		4 Dokumen	4 Dokumen	48.800.000,00	48.800.000,00	35.460.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		48.800.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pengawasan Penggunaan Anggaran														
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		25 Dokumen	25 Dokumen	193.450.000,00	193.450.000,00	92.850.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		193.450.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi		100 %	100 %	4.109.406.029,00	3.948.324.529,00	3.948.324.529,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		4.109.406.029,00	SEKRETAR IAT DPRD
Orientasi DPRD														

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		30 Dokumen	30 Dokumen	500.000.000,0 0	500.000.000,00	301.374.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		500.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Pendalaman Tugas DPRD														
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		40 Dokumen	40 Dokumen	1.996.832.980,0 00	1.999.832.980,0 0	3.228.468.980,0 0	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		1.996.832.980,0 00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		7 Orang	7 Orang	300.000.000,0 0	300.000.000,00	539.756.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		300.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		5 Orang	3 Orang	180.000.000,0 0	180.000.000,00	337.500.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		180.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,0 0	28.744.874,00	13.948.874,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		100.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD														

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,0 0	47.173.626,00	28.039.626,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		150.000.000,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		96 Dokumen	96 Dokumen	882.573.049,0 0	892.573.049,00	1.913.383.141,0 0	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		882.573.049,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi		100 %	100 %	6.406.194.300, 00	6.406.194.300,0 0	6.406.194.300,0 0			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		6.712.194.464, 00	SEKRETAR IAT DPRD
Kunjungan Kerja dalam Daerah														
	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		360 Laporan	360 Laporan	124.984.000,0 0	124.984.000,00	95.464.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		132.059.884,0 0	SEKRETAR IAT DPRD
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		90 Dokumen	90 Dokumen	78.535.380,00	78.535.380,00	47.251.380,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		80.134.580,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pelaksanaan Reses														

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		90 Dokumen	90 Dokumen	6.202.674.920,00	6.202.674.920,00	9.611.706.920,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		6.500.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi		100 %	100 %	170.824.725,00	170.824.725,00	170.824.725,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		201.324.725,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyusunan Kode Etik DPRD														
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1 Dokumen	1 Dokumen	44.500.000,00	44.500.000,00	3.610.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		75.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pengawasan Kode Etik DPRD														
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		2 Laporan	2 Laporan	126.324.725,00	126.324.725,00	1.412.547.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		126.324.725,00	SEKRETAR IAT DPRD
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi		100 %	100 %	612.075.000,00	587.952.271,00	587.952.271,00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		612.075.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	575.877.271,00	243.778.271,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		600.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et		Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		4 Dokumen	4 Dokumen	12.075.000,00	12.075.000,00	12.075.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		12.075.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi		100 %	100 %	25.370.891.92 0,00	25.370.891.920, 00	25.370.891.920, 00			-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		25.505.300.80 0,00	SEKRETAR IAT DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		290 Dokumen	290 Dokumen	25.161.763.00 0,00	25.161.763.000, 00	21.776.460.000, 00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		25.130.300.80 0,00	SEKRETAR IAT DPRD
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		4 Laporan	4 Laporan	44.502.920,00	44.502.920,00	44.502.920,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		50.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		12 Dokumen	12 Dokumen	84.172.000,00	84.172.000,00	39.314.900,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		75.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasiona l	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD		12 Dokumen	12 Dokumen	80.454.000,00	80.454.000,00	40.227.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		75.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	1.546.332.000,00	Kab. Tabalong , Murung Pudak, Mabu'un	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal		175.000.000,00	SEKRETAR IAT DPRD
J U M L A H					88.669.624.339,00	108.779.481.039,00	101.204.483.535,00						93.756.259.193,00	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024, sehingga difokuskan pada upaya pencapaian seluruh target pada Renstra.
3. Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Sekretariat DPRD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya Perubahan berdasarkan hasil asistensi dan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.

c Rencana Tindak Lanjut

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk setiap triwulannya.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong, dengan melibatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dan stakeholders pembangunan di Kabupaten Tabalong.

Akhir kata, Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN TABALONG

Drs. H. ABUBAKAR SIDIQ
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670720 199103 1 014